
Kinerja Pendapatan dan Belanja Kota Malang Tahun 2018–2023

Mega Tunjung Hapsari¹, Dhea Ni'matul Maula², Dini Ayuningtyas³, Dwi Haziza
Tussholeha⁴, Egista Yessandrina Setiyorini⁵, Nadia Alifatul Isna⁶

^{1,2,3,4,5,6} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Alamat: Jl. Mayor Sujadi No.46, Tulungagung, Indonesia

Korespondensi penulis: megahapsari@uinsatu.ac.id, egistayessandrinasetiyorini@gmail.com

Abstract. . *Evaluation of Regional Government financial performance is important and needs to be carried out. The aim of this research is to check the financial performance of the Malang City Government by analyzing financial reports from 2018 to 2023. This research is descriptive qualitative with secondary data obtained from the Malang City Central Statistics Agency. The results show that the degree of decentralization ratio has an average of Fair Performance, the financial independence ratio has an average of Low Performance, the efficiency ratio has an average of Inefficient Performance, the ratio of operational expenditure to total expenditure has an average of Good Performance, the ratio of capital expenditure to total expenditure with average Good Performance, and ratio of expenditure growth with average Good Performance.*

Keywords: *Analysis of Regional Financial Reports, Public Financial Performance, Malang City*

Abstrak. Evaluasi kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah penting dan perlu dilakukan. Tujuan penelitian ini untuk melihat kinerja keuangan Pemerintah Kota Malang dengan menganalisis laporan keuangan dari tahun 2018 hingga 2023. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Malang. Hasil menunjukkan bahwa rasio derajat desentralisasi memiliki rata-rata Kinerja Cukup, rasio kemandirian keuangan memiliki rata-rata Kinerja Rendah, rasio efisiensi dengan rata-rata Kinerja Tidak Efisien, rasio belanja operasional terhadap total belanja dengan rata-rata Kinerja Baik, rasio belanja modal terhadap total belanja dengan rata-rata Kinerja Baik, dan rasio pertumbuhan belanja dengan rata-rata Kinerja Baik.

Kata kunci: *Analisis Laporan Keuangan Daerah, Kinerja Keuangan Publik, Kota Malang*

1. LATAR BELAKANG

Pemerintah daerah merupakan pengatur seluruh pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat setempat. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan menyelenggarakan dan mengurus pemerintahannya sendiri berdasarkan asas otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan fleksibilitas pemerintah daerah dalam menyikapi sumber daya yang ada guna memastikan kelancaran operasional dan akuntabilitas kepada masyarakat luas. Pemerintah daerah wajib menggambarkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai laporan keuangan berdasarkan Laporan Standar Akuntansi Negara Nomor 1 tentang laporan keuangan penyajian. Kapasitas pengelolaan pemerintahan daerah di bidang keuangan tertuang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mengkaji kemampuan pemerintahan di daerah mengelola pendanaan yang memenuhi kewajiban pemerintah, pembangunan, dan pelayanan sosial daerah. Penilaian terhadap situasi pengelolaan penyelenggara daerah otonom, keuangan daerah dapat menjadi tolak ukur posisi pemerintahan dalam konteks pelaksanaan di daerah otonom.

Laporan keuangan disiapkan guna memberikan rincian informasi penting yang diperlukan tentang status keadaan seluruh transaksi keuangan yang dapat dilaporkan sepanjang

suatu periode waktu tertentu. Laporan keuangan sangat penting untuk mengevaluasi daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan operasi pemerintah, serta menilai keuangan publik, untuk evaluasi efektivitas dan efisiensi pelaporan. Informasi fiskal meliputi data berbagai bentuk pembiayaan, pengeluaran, dan investasi pada kegiatan pemerintahan yang dituangkan dalam laporan keuangan daerah. Oleh karena itu, akuntabilitas dan transparansi menjadi landasan kinerja pemerintah yang bebas penyimpangan. Kinerja fiskal pemerintah daerah merupakan tingkat kinerja survei fiskal di berbagai daerah, termasuk belanja daerah dan pendapatan dimana sistem keuangan digunakan.

Penelitian dilakukan bertujuan guna mengevaluasi hasil kinerja keuangan yakni menilai apakah pemerintahan suatu daerah telah berhasil dalam mengelola keuangannya secara efisien dan efektif. Efisiensi berarti menggunakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin, sedangkan efektivitas berarti mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan daerah, baik faktor internal (seperti kebijakan anggaran, kapasitas aparatur) maupun eksternal (seperti kondisi ekonomi nasional, kebijakan pemerintahan pusat). Adapun tujuan lain penelitian ini yakni untuk menyusun saran-saran perbaikan untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah di masa mendatang. Misalnya, bagaimana cara meningkatkan pendapatan asli daerah, mengoptimalkan penggunaan anggaran, atau memperkuat kelembagaan.

2. KAJIAN TEORITIS

Analisis Rasio Keuangan

Menurut Mahmudi (2019) rasio keuangan yaitu perbandingan data laporan keuangan berfungsi untuk menunjukkan pertumbuhan operasi kinerja keuangan suatu perusahaan dari tahun ke tahun berikutnya.

a) Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio ini mencerminkan kemampuan keuangan dalam daera ketika membayar aktivitas lokalnya, yang diukur menggunakan proporsi negatif di antara pendapatan asli daerah dan total pendapatan daerah. Tingginya kontribusi desentralisasi, maka akan semakin besar juga pendapatan asli daerah, sehingga mempengaruhi kinerja penyelenggaraan desentralisasi pada wilayah tersebut. Rumus analisis derajat desentralisasi yaitu:

$$DD = \frac{PAD}{Total\ Pendapatan\ Daerah} \times 100\%$$

Derajat desentralisasi dikategorikan dengan skala interval guna menentukan kriteria rasio derajat desentralisasi sebagai berikut:

00,00% - 10,00%, artinya kinerja keuangan daerah sangat kurang

10,01% - 20,00%, artinya kinerja keuangan daerah kurang

20,01% - 30,00%, artinya kinerja keuangan daerah cukup

30,01% - 40,00%, artinya kinerja keuangan daerah sedang

40,01% - 50,00%, artinya kinerja keuangan daerah baik

>50,00%, artinya kinerja keuangan daerah sangat baik

b) Rasio Kemandirian Keuangan

Rasio kemandirian adalah analisis dengan digambarkan sejauh mana pemerintah daerah berupaya meningkatkan inisiatif daerahnya sendiri. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan proporsi Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan total Pendapatan Daerah yang diperoleh dari sumber lain, misalnya Pendapatan penyaluran dana melalui transfer. Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat menggunakan rumus berikut:

$$KK = \frac{PAD}{Transfer\ Pusat + Provinsi + Pinjaman} \times 100\%$$

Rasio kemandirian keuangan suatu daerah memiliki pola hubungan:

00,00% - 25,00%, artinya kemandirian daerah rendah sekali (instruktif)

25,01% - 50,00%, artinya kemandirian daerah rendah (konsultatif)

50,01% - 75,00%, artinya kemandirian daerah sedang (partisipatif)

>75%, artinya kemandirian daerah tinggi (delegatif)

c) Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi keuangan daerah mencerminkan perbandingan dari biaya yang dipakai guna mencapai realisasi belanja daerah dan realisasi pendapatan yang didapatkan (Fathah, 2017). Dengan demikian, rasio ini berfungsi untuk menilai efektivitas pemerintah daerah ketika melakukan penghematan anggaran. Analisis rasio efisiensi keuangan daerah menggunakan rumus berikut:

$$EKD = \frac{Belanja\ Daerah}{Pendapatan\ Daerah} \times 100\%$$

Rasio efisiensi mengacu pada pengkategorian kriteria berikut:

>100%, artinya kinerja keuangan daerah tidak efisien

90% - 100%, artinya kinerja keuangan daerah kurang efisien

80% - 90%, artinya kinerja keuangan daerah cukup efisien

60% - 80%, artinya kinerja keuangan daerah efisien

<60%, artinya kinerja keuangan daerah sangat efisien

Analisis Rasio Belanja Daerah

a) Rasio Belanja Operasional terhadap Total Belanja (BOTB)

Rasio Belanja Operasional adalah perbandingan dari belanja total dan belanja operasional, untuk mempertimbangkan rasio ini, pemerintah menentukan prioritas mana yang harus diprioritaskan untuk belanja operasional. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi biasanya menghabiskan lebih banyak uang untuk operasi daripada pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang cukup rendah. Dengan perumusan berikut:

$$\text{BOTB} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasional}}{\text{Target Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Kategori rasio belanja operasional:

Di nilai angka $\leq 90\%$, artinya kinerja dalam belanja operasional baik

Di nilai angka $\geq 90\%$, artinya kinerja dalam belanja operasional kurang baik

b) Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja (BMTB)

Salah satu alat yang dapat dipakai untuk memastikan seberapa besar bagian belanja modal dalam total belanja di suatu daerah adalah rasio belanja modal. Belanja modal mencakup pengeluaran total daerah seperti untuk investasi, dan pengeluaran lain-lain. Rumus dari rasio belanja modal dalam total belanja:

$$\text{BMTB} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Target Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria rasio BMTB:

Di nilai angka $>5\%$, artinya belanja modal baik

Di nilai angka $<5\%$, artinya belanja modal kurang baik

c) Rasio Pertumbuhan Belanja

Rasio pertumbuhan belanja merupakan salah satu bentuk pengukuran yang dipakai guna mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah untuk mempertahankan atau meningkatkan lagi kinerja keuangan selama satu periode anggaran ke periode selanjutnya. Perhitungan rasio pertumbuhan belanja dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$PB\ Th\ t = \frac{Belanja\ Th\ t - Belanja\ Th\ (t-1)}{Belanja\ Th\ (t-1)} \times 100\%$$

Analisis rasio pertumbuhan pendapatan menghasilkan evaluasi berikut:

Pertumbuhan belanja \leq Pertumbuhan Pendapatan, artinya kinerja belanja dinilai baik

Pertumbuhan belanja \geq Pertumbuhan Pendapatan, artinya kinerja belanja dinilai kurang baik

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki suatu kondisi ilmiah yang menjadikan penelitian sebagai instrumen penting dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk pengumpulan data yang difokuskan pada dasar Badan Pusat Statistika laporan tahunan Kota Malang. Laporan pendapatan dan belanja daerah Kota Malang 2018–2023 adalah laporan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengukuran Rasio Keuangan

Rasio Derajat Desentralisasi

Tabel 1. Rasio Derajat Desentralisasi Kota Malang Tahun 2018-2023

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	DD	Kinerja
2018	556.888.383.143,67	2.040.194.240.906,70	27,29%	Cukup
2019	588.066.042.351,01	2.187.985.479.986,00	26,87%	Cukup
2020	491.189.243.955,35	1.956.090.185.104,40	25,11%	Cukup
2021	603.794.666.883,32	2.152.355.838.252,90	28,05%	Cukup
2022	718.337.293.395,35	2.171.753.457.135,90	33,07%	Sedang
2023	792.120.013.218,17	2.344.815.945.277,80	33,78%	Sedang
Rata-rata	625.065.940.491,14	2.142.199.191.110,61	29,17%	Cukup

Sumber: Badan Pusat Statistika Kota Malang Tahun 2018-2023

Dari tabel 1 diatas dapat diartikan bahwa kinerja desentralisasi kota Malang tahun 2018-2023 adalah cukup. Dengan nilai persentase konstan diatas angka 20%. Dimana pada tahun 2018 kinerja desentralisasi cukup di persentase 27,29% namun ditahun berikutnya mengalami penurunan presentase desentralisasi yakni 26,87% di tahun 2019 dan menurun lagi menjadi

25,11% di tahun 2020 namun kinejanya termasuk cukup. Kemudian mulai pada tahun 2021 seluruh wilayah di negara Indonesia mulai memasuki era new normal yang sebelumnya diakibatkan oleh pandemi covid-19 yang mengharuskan seluruh wilayah memperkecil pergerakan diluar rumah, sehingga pada tahun 2021 ini kinerja desentralisasi memiliki nilai persentase yang mulai meningkat hingga pada tahun 2022 dan 2023 yang mendapatkan nilai persentase diatas nilai 30% yaitu 33,07% di tahun 2022 dan naik ke 33,78% pada tahun 2023 yang berarti kinerja disentralisasi sedang. Derajat desentralisasi kota Malang juga memiliki nilai rata-rata 29,17% yang berarti menyentuh nilai paling atas di nilai kinerja cukup dimana nilai ini menandakan bahwa kota Malang memiliki pendapatan asli daerah yang berkontribusi baik guna menghasilkan pendapatan daerah. Sehingga kota Malang memiliki Pendapatan Asli Daerah yang tinggi yang artinya kemampuan peyelenggaraan desentralisasi pemerintah kota Malang tinggi.

Rasio Kemandirian Keuangan

Tabel 2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Eksteren (Rp)	KK (%)	Kinerja
2018	556.888.383.143,67	1.483.305.857.763,00	37,54%	Rendah
2019	588.066.042.351,01	1.599.919.437.635,00	36,75%	Rendah
2020	491.189.243.955,35	1.464.900.941.149,00	33,53%	Rendah
2021	603.794.666.883,32	1.548.561.171.369,55	38,98%	Rendah
2022	718.337.293.395,35	1.453.416.163.740,50	49,42%	Rendah
2023	792.120.013.218,17	1.552.695.932.059,64	51,01%	Sedang
Rata-rata	3.750.395.642.946,87	9.102.799.503.716,69	41,20%	Rendah

Sumber: Badan Pusat Statistika Kota Malang Tahun 2018-2023

Melalui hasil tabel 2. diatas bisa diartikan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah kota Malang tahun 2018-2023 adalah rendah, dengan persentase 41,20%. Di tahun 2018 ke tahun berikutnya yakni 2019 terjadi penurunan tingkat kemandirian keuangan dari dari 37,54% menjadi 36,75%. Pada 2019 ke tahun berikutnya 2020 terjadi penurunan kemandirian yang cukup drastis dari 36,75% menjadi 33,53%. Penurunan kemandirian daerah disebabkan karena adanya pandemi pada tahun 2020 yakni *Covid-19*, akibatnya menyebabkan PAD kota Malang mengalami kesulitan dimana terjadi penurunan pendapatan. Pada tahun 2021 hingga 2023

merupakan pasca pandemi *covid-19* sehingga PAD kota Malang mengalami kenaikan kembali. Kenaikan PAD ini menjadikan kinerja keuangan kota Malang menjadi lebih mandiri.

Rasio Efisiensi

Tabel 3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023

Tahun	Belanja Daerah (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	EKD (%)	Kinerja
2018	1.925.070.651.868,60	2.040.194.240.906,70	94,35%	Kurang Efisien
2019	1.909.775.302.319,20	2.187.985.479.986,00	87,28%	Cukup Efisien
2020	2.103.467.535.397,30	1.956.090.185.104,40	107,53%	Tidak Efisien
2021	2.225.952.718.513,60	2.152.355.838.252,90	103,41%	Tidak Efisien
2022	2.188.318.745.870,30	2.171.753.457.135,90	100,76%	Tidak Efisien
2023	2.596.706.284.209,90	2.344.815.945.277,80	110,74%	Tidak Efisien
Rata-rata	2.158.215.206.363,15	2.142.199.191.110,61	100,74%	Tidak Efisien

Sumber: Badan Pusat Statistika Kota Malang Tahun 2018-2023

Dalam hasil tabel 3. diketahui rasio efisiensi kota Malang mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 efisiensi keuangan daerah kota Malang memiliki kinerja kurang efisien dengan persentase 94,35%. Pada tahun 2019 efisiensi keuangan daerah kota Malang memiliki kinerja cukup efisien dengan persentase 87,28%. Pada tahun 2020–2023 efisiensi kota Malang memiliki kinerja kurang efisien dengan persentase lebih besar dari 100%. Secara keseluruhan kinerja keuangan kota Malang tidak efisien, karena hal ini disebabkan belanja daerah lebih besar daripada pendapatan daerah. Rasio efisien terlalu rendah, sehingga menunjukkan jika pemerintahan daerah semakin efisien dalam menghasilkan produk atau layanan. Namun, jika rasio efisiensi terlalu bernilai tinggi, akan menunjukkan kalau pemerintah daerah dapat menyumbangkan kualitas produk atau layanan untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi.

Pengukuran Rasio Belanja Daerah

Rasio Belanja Operasional terhadap Total Belanja

Tabel 4. Rasio BOTB Kota Malang Tahun 2018-2023

Tahun	Belanja Operasi (Rp)	Total Belanja (Rp)	BOTB (%)	Kinerja
2018	1.573.833.302.429,70	1.925.070.651.868,60	81,75%	Baik
2019	1.669.892.391.899,50	1.909.775.302.319,20	87,44%	Baik

2020	1.685.625.501.405,50	2.103.467.535.397,30	80,14%	Baik
2021	1.885.305.464.517,50	2.225.952.718.513,60	84,70%	Baik
2022	1.871.107.791.922,30	2.188.318.745.870,30	85,50%	Baik
2023	2.188.051.811.802,90	2.596.706.284.209,90	84,27%	Baik
Rata-rata	1.812.302.710.662	2.158.215.206.363	83,97%	Baik

Sumber: Badan Pusat Statistika Kota Malang Tahun 2018-2023

Pada tabel 4. Disimpulkan bahwa perhitungan rasio belanja operasional terhadap total belanja tersebut memperlihatkan bahwa tahun 2019 hasil presentase rasio BOTB mendapatkan nilai sebesar 87,44% yang kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 80,14% mengalami kenaikan kembali pada tahun 2021 dengan presentase diperoleh sebesar 84,70%. Rasio belanja operasional terhadap total belanja kota Malang memiliki kinerja yang baik selama periode tahun 2018-2023. Hal ini terlihat dari rata-rata rasio BOTB 83,97% yang masih berada di bawah 90% sepanjang periode 2018-2023. Setelah 6 tahun, sebagian besar kinerja BOTB Kota Malang masih berada dalam batas yang dapat diterima.

Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja

Tabel 5. Rasio BMTB Kota Malang Tahun 2018-2023

Tahun	Belanja Modal (Rp)	Total Belanja (Rp)	BMTB (%)	Kinerja
2018	351.203.268.896,86	1.925.070.651.868,60	18,24%	Baik
2019	238.525.539.354,66	1.909.775.302.319,20	12,48%	Baik
2020	363.227.224.639,75	2.103.467.535.397,30	17,26%	Baik
2021	295.092.608.923,53	2.225.952.718.513,60	13,25%	Baik
2022	310.828.967.621,00	2.188.318.745.870,30	14,20%	Baik
2023	405.779.018.058,00	2.596.706.284.209,90	15,62%	Baik
Rata-rata	327.442.771.248,97	2.158.215.206.363,15	15,17%	Baik

Sumber: Badan Pusat Statistika Kota Malang Tahun 2018-2023

Melalui hasil tabel 5. Kita dapat melihat kalau belanja modal kota Malang mengalami fluktuasi. Dari tahun 2018 hingga 2019 mengalami kemunduran yang sangat signifikan yaitu dari 18,24% menjadi 12,48%. Pada tahun 2020 kota Malang mengalami kenaikan belanja modal yaitu dari 12,48 menjadi 17,26. Pada tahun 2021-2023 mengalami kenaikan secara terus menerus. Pada tahun 2021 yaitu 13,25%, pada tahun 2022 menjadi 14,20% dan pada

tahun 2023 menjadi 15,67%. Rasio belanja modal kota Malang secara keseluruhan memiliki kinerja baik dengan nilai rata-rata rasio 15,17%.

Rasio Petumbuhan Belanja

Tabel 6. Rasio Pertumbuhan Belanja Kota Malang Tahun 2018-2023

Tahun	Belanja	Pertumbuhan Pendapatan (%)	Pertumbuhan Belanja (%)	Kinerja
2017	1.813.917.438.251,50	-	-	
2018	1.925.070.651.868,60	3,46%	6,12%	Kurang Baik
2019	1.909.775.302.319,20	7,242%	-7,94%	Baik
2020	2.103.467.535.397,30	-10,59%	10,14%	Kurang Baik
2021	2.225.952.718.513,60	10,03%	5,82%	Kurang Baik
2022	2.188.318.745.870,30	9,01%	-16,90%	Baik
2023	2.596.706.284.209,90	7,6%	18,66%	Kurang Baik
Rata-rata	2.158.215.200.000	4,45%	2,65%	Baik

Sumber: Badan Pusat Statistika Kota Malang Tahun 2018-2023

Pada tabel 6. pada tahun 2020-2023 rasio pertumbuhan belanja Kota Malang berfluktuasi. Pada tahun 2018, 2020, 2021, dan 2023 pertumbuhan belanja Kota Malang dalam kinerja kurang baik. Dikarenakan pertumbuhan belanja yang bernilai tinggi daripada pertumbuhan pendapatan. Rata-rata rasio pertumbuhan belanja Kota Malang berdasarkan pada tabel diatas memiliki kinerja baik karena pertumbuhan belanjanya lebih kecil daripada pertumbuhan pendapatan. Hal ini ditandai dari laju pertumbuhan belanja sebesar 2,65% dan laju pertumbuhan pendapatan sebesar 4,29%.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kinerja keuangan Kota Malang menunjukkan hasil yang beragam dalam beberapa aspek desentralisasi dan kemandirian fiskal. Meskipun kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif kecil, kinerja desentralisasi dinilai cukup baik dengan rasio efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Tingkat kemandirian keuangan daerah tergolong rendah, namun ada pemulihan pasca-pandemi dari tahun 2021 hingga 2023. Rasio efisiensi keuangan menunjukkan kinerja yang kurang efisien, meskipun operasional belanja stabil, pengawasan

diperlukan untuk mencegah penurunan signifikan di masa depan. Moda belanja memiliki kinerja yang baik dengan rasio rata-rata 15,17%, menunjukkan stabilitas meskipun ada musim yang buruk. Secara keseluruhan, perekonomian Kota Malang tampak stabil dengan pengendalian baik atas pertumbuhan belanja dan pendapatan, namun perlu adanya kewaspadaan untuk menjaga keseimbangan antara belanja dan pendapatan.

Untuk meningkatkan efisiensi, perlu dilakukan pengawasan lebih ketat terhadap operasional belanja. Stabilitas belanja tercermin dari rasio moda belanja yang baik. Secara keseluruhan, pengendalian pertumbuhan belanja dan pendapatan harus tetap dijaga untuk menjamin keseimbangan keuangan daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Halim. 2007. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Ariadi, W., & Jatmika, W. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Dimasa Pandemi Coved-19. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 11–15. <https://doi.org/10.55049/jeb.v12i1.63>.
- Badan Pusat Statistik Kota Malang. *Keuangan Pemerintah, Fiskal, dan Statistik Sektor Publik*. Diakses dari <https://malangkota.bps.go.id>.
- Berizky, K., & Kurniawan, R. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019–2022. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(1), 246–259. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i1.3662>.
- Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal EBBANK*, 8(1), 33–48. <https://repository.ut.ac.id>.
- Inrawati, Saripuddin D, & Zainal Abidin. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Makasar. *Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia*, 4(3): 403–416. <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/JMMNI>.
- Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Keempat: UPP STIM YKPN.
- Purba, S., Jessika, L., Debora, G., Pakpahan, R., & Syaputri, J. (2024). Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal. *Jurnal EMA*, 9(1), 107–118. <http://dx.doi.org/10.51213/ema.v9i1.425>.
- Puspita, Geatri Br Perangin-Angin, & Puspita Geatri Br. (2023). Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019–2022. *Manajemen Kreatif Jurnal (MAKREJU)*, 1(3): 173–183. <https://doi.org/10.55606/makreju.v1i3.1657>.

- Saragih, F., & Siregar, I. (2021). Analisis Rasio Keuangan dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tebing. *Jurnal Scenario (Seminar Of Social Sciences Engineering And Humaniora)*, 1(1): 43–53. <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php>.
- Selvi, N. M., & Hapsari, M. T. (2023). Kinerja Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Sebelum, Saat, dan Pasca Pandemi Covid-19 (Tahun 2017-2022). *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Auditing)*, 4(1), 205–214. <https://doi.org/10.56696/jaka.v4i1.8305>.
- Sugiyono. 2017. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Utari, Rini., Anisa Nursyabani., & Hurun In. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiska, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Efektifitas. *Jurnal Eko-Bisma*, 3(2), 204–209. <https://doi.org/10.58268/eb.v2i2.66>
- Wulandari, R., Lestari, B. A. H. ., & Suryantara, A. B. (2023). Analisis Rasio Keuangan dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(2), 56–69. <https://doi.org/10.29303/risma.v3i2.657>.
- Zainul Muzaki M, M. ., & Tunjung Hapsari, M. (2022). Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisiensi, terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015–2021. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* , 2(1), 289–304. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.548>.